

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) membahas tentang hubungan keagenan yang terjadi antara para pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Konflik kepentingan antara agen dan principal dalam mencapai kesejahteraan yang dikehendakinya disebut dengan masalah keagenan. Sulistyanto (2008:29-30) menyatakan bahwa hubungan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan seharusnya menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme yang menguntungkan semua pihak, khususnya apabila setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Pajak dari sisi fiskus merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara (Hardika, 2007).

2.1.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan hubungan antara pemberian informasi perusahaan dan persepsi investor dimana teori sinyal menurut Prasiwi (2015), menjelaskan bagaimana pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- terhadap keputusan investasi pihak luar. Teori sinyal menurut Wolk (dalam Thiono, 2006), menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, yang dimotivasi karena asimetris informasi (*asymmetri information*) antara perusahaan (*agent*) dan pihak luar (*principal*), dimana informasi yang diberikan dapat di respon sebagai sinyal.

Teori Sinyal seperti yang dijelaskan diatas membahas hubungan antartainformasi yang diberikan oleh perusahaan dapat memberikan sinyal positif (*goodnews*) atau sinyal negatif (*bad news*) kepada investor (Prasiwi, 2015).Sinyaltersebut menjadi dasar investor dapat mengetahui prospek masa depan perusahaansehingga dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi,investor dapatmembedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik,sehingga di masa mendatang dapat memberikan keuntungan bagi investor(Alivia,2013). Pihak manajer berpandangan praktik penghindaran pajak yangtelah dilakukan yang menghasilkan informasi laba setelah pajak yang tinggidiharapkan dapat memberikan sinyal positif yang dapat meningkatkan nilaiperusahaan yang ditunjukkan oleh peningkatan harga saham perusahaan dariwaktu ke waktu (Simarmata,2012).Pratik penghindaran pajak dapat dinilai sebagaisinyal positif maupun negatif (Hanlon *et al.*, 2009).Penelitian Hanlon *et al.*,(2009) membuktikan penghindaran pajak dipandang positif jika dipandangsebagai upaya dalam melakukan perencanaan pajak dan efisiensi pajak dan resiko deteksinya kecil, dan penghindaran pajak dipandang negatif jika dipandangketidakpatuhan karena tindakan tersebut berisiko deteksi besar

menjadikan akan menimbulkan biaya yang tinggi nantinya sehingga nilai perusahaan menurun positif atau negatif oleh investor.

2.1.3 Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara pasal 1 UU No.28 tahun 2007 mengatakan bahwa pajak merupakan: “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diberikan oleh masyarakat secara wajib untuk digunakan sebagai keperluan dan pengeluaran negara.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo:2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikarenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: 1.) pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 2.) Pajak Kabupaten/kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.6 Tax Avoidance

Tax avoidance menurut (Pohan, 2013:23) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. pengukuran *tax avoidance* menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*.

Menurut (Fidel 2010:61) dalam menentukan penghindaran perpajakan, maka komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada 3 (tiga) karakter penghindaran pajak, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya unsur arti fisis dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh yang pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga kerahasiaan mungkin.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa penghindaran pajak sebenarnya telah “dijaga” dengan rambu-rambu yang ada pada peraturan perundang-undangan perpajakan, walaupun ada yang masih dihindarkan hal itu dikarenakan masih adanya celah yang dapat diambil dari pembuatan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.7 Profitabilitas

Menurut penelitian (Maharani dan Suardana, 2014). Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). Menurut Siahaan (2014) ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA

digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas.

Menurut penelitian Adinda Lionita H dan Ani Kusbandiyah(2017)Profitabilitas merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan, sehingga beban pajakpun semakin tinggi.

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log size* dan sebagainya.

Menurut Dharma dan Ardiana (2016) Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak.

Berdasarkan penelitian Ngadiman dan puspitasari (2014) penentu ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan

memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba di banding dengan perusahaan dengan total aset kecil.

2.1.9 Umur perusahaan

Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI (Dewinta dan Setiawan 2016). Hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan *go public*, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

2.2 Pajak dalam Pandangan Islam

Pengertian pajak menurut para ulama sebagai berikut: Pengertian pajak menurut pendapat Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan negara, tanpa mendapat prestasi kembalidari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Gazi Inayah, pengertian pajak ialah kewajiban untuk membayar tunai yang dicantuan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Dalam hal ketentuan pemerintah disesuaikan dengan kemampuan si pemilik harta dan digunakan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Abdul Qadim Zallum mengungkapkan bahwa pengertian pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Berdasarkan pengertian pajak diatas, terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu sebagai berikut:

1. Objeknya adalah harta (*al-Mal*)
2. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*) dalam hal ini tidak termasuk non muslim
3. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim)
4. Diberlakukan karna adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera di atasi oleh Ulil Amri.

Firman allah yang berkenaan dengan pajak terdapat pada Al-Qur'an Surah

An -nisa ayat 29:

عَنْ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأَيَّهَا رَحِيمًا بَيْنَكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan penjelasan sebagai berikut adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotifasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) demi kebaikan jadi penerapan pajak oleh Islam pun dianjurkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

2.2.1 Karakteristik Pajak Menurut Syariah

Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut syariat Islam (Gusfahmi 2011:33) yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu :

1. Pajak (Dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh di pungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sungguhpun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (Mustahik). Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah abadi (selamanya).
2. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak hanya di pungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban kaum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

non-muslim, sedangkan teori pajak non Islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

4. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Muslim pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya. Melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikonsumsi.
5. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak ada batasan pemungutan selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.
6. Pajak dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan pera Khilafah sesudah beliau. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan. Malahan ada suatu ungkapan orang inggris yang menyatakan bahwa ada 2 hal yang pasti didunia ini yaitu kematian dan pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1.	Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017)	Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Koneksi Politik pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: Corporate Governance, Profitabilitas dan Koneksi Politik	Hasil penelitian tersebut <i>corporate governance</i> yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen terbukti tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> ; <i>Corporate governance</i> diproksikan dengan keberadaan komite audit terbukti tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> ; Profitabilitas diproksikan dengan <i>return on assets</i> terbukti berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> ; Koneksi politik diproksikan dengan variabel <i>dummy</i> terbukti berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> .
2.	I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen : Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage.	Dapat diperoleh simpulan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen dan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi mampu membayar beban pajaknya dan menjaga nilai perusahaan di mata pemegang saham akan menyebabkan perusahaan meminimalkan perilaku <i>tax avoidance</i> . Keberadaan kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2) umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 4) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 5) Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
4.	I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel independen: <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik.	dapat diambil simpulan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i>	Dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . Jumlah komite tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> . Untuk pengujian total aset, total aset yang merupakan <i>proxy</i> dari ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . Sedangkan untuk <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> dan hasil uji analisis regresi membuktikan bahwa secara statistik <i>sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
6.	Mardiah Nusari, Diamonalisa, dan Edi Sukarmanto (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Konstitusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Konstitusional.	1. Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Kepemilikan Konstitusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Melisa Fadila (2017)	Pengaruh <i>Return On Asste</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015)	Variabel Independen : <i>Return On Asste</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Koneksi Politik.	1. <i>Return On Asset</i> (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 5. Hasil pengujian terhadap hipotesis kelima menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 6. Hasil pengujian menunjukkan

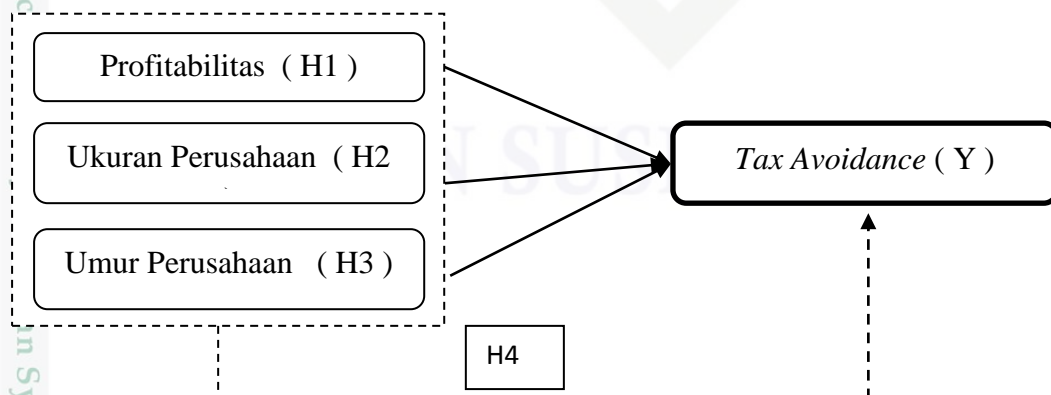


No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
8	Vidiyanna dan Bella (2017) Rizal Irwasyah Putra	Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Perusahaan terhadap Tax Avoidance	Variabel independen : Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Perusahaan	<p>bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar atau kecilnya tingkat koneksi politik suatu perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak perusahaan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leverage berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Proporsi Kepemilikan Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen (variabel bebas), yaitu Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan. Dengan satu variabel dependen (variabel terikat) yaitu Tax Avoidance (CETR).

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



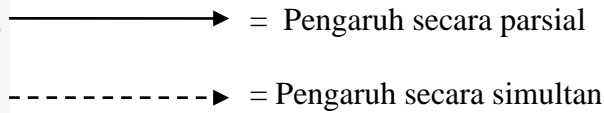
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :



Dari bagan yang tersajikan di atas, terlihat bahwa *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas.

Penelitian Ni Kadek Yuliani Utari dan Ni Luh Supadmi (2017) menyatakan bahwa Profitabilitas diproksikan dengan *return on assets* terbukti berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Kemudian penelitian I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017) juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Mardiah Nusari, Diamonalisa, dan Edi Sukarmanto (2017) yang mengatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H0: Diduga Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H1: Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan(2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Menurut penelitian Vidiyanna Rizal Putri dan Bella Irwasyah Putra (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Penelitian ini sejalan dengan penelitian Melisa Fadila (2017) yang menyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H0: Diduga Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.3 Pengaruh umur perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Umur perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas *tax avoidance*. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* artinya semakin lama jangka waktu operasional perusahaan, semakin tinggi pula aktivitas *tax avoidance* perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jangka waktu operasional yang relatif lebih lama akan lebih terampil dan lebih berpengalaman dalam pengelolaan manajemen keuangan terkait dengan urusan pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien menurut Claudio Loderer dan Urs Waelchli (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “*Firm Age and Performance*”. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Perusahaan dengan jangka waktu operasional lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan untuk menekan beban pajak perusahaan sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal. Secara logika, semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola beban pajaknya sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H0 : Diduga Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3 : Diduga Umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.5.4 Pengaruh secara simultan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Adapun variabel independen ini terdiri dari Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan yang secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*. Hal ini dapat dirumuskan pada rumusan hipotesis berikiut ini :

H0 : Diduga Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H4 : Diduga Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.